

A Dynamic System Approach: Modalitas Kontrol Pemerintah Terhadap Agenda Pembangunan di Negara Berkembang

Indra Kusumawardhana

Afiliasi: Universitas Pertamina, Indonesia
Email Korespondensi: Indra.Kusumawardhana@universitaspertamina.ac.id

Abstrak: Pembangunan merupakan salah satu agenda utama setiap negara, termasuk negara-negara berkembang. Pemerintah memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Peran ini dapat berkisar dari penyediaan infrastruktur publik, perlindungan hak-hak properti, pengaturan aktivitas ekonomi, hingga intervensi langsung dalam perekonomian. Artikel ini akan melakukan analisis eksplanatif terhadap modalitas kontrol Pemerintah dalam Agenda Pembangunan di Negara Berkembang. Dalam rangka menjelaskan secara analitis, penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dinamis (Dynamic Systems Approach) untuk mensimulasikan variabel kontrol yang menjadi modalitas pemerintah dalam melaksanakan agenda pembangunan di negara berkembang. Berlandaskan simulasi yang dilakukan terdapat tiga aspek yang paling penting sebagai modalitas kontrol Pemerintah yakni Pengawasan, Kebijakan Fiskal, dan Penetapan Hukum dan Aturan.

Kata Kunci: Pemerintah, Negara Berkembang, Agenda Pembangunan, Modalitas Kontrol, Pendekatan Sistem Dinamis.

Abstract: Development is one of the main agendas of every country, including developing countries. Governments have a central role in economic development, especially in developing countries. These roles can range from the provision of public infrastructure, the protection of property rights, the regulation of economic activity, to direct intervention in the economy. This article will conduct an explanatory analysis of the modalities of government control in the Development Agenda in Developing Countries. In order to explain analytically, this study uses a dynamic systems approach (Dynamic Systems Approach) to simulate control variables that become government modalities in implementing development agendas in developing countries. Based on the simulation, there are three most important aspects as a modality of government control, namely Supervision, Fiscal Policy, and the Establishment of Laws and Rules.

Keywords: Governments, developing countries, development agendas, control modalities, dynamic systems approaches.

Article History:

Received; 10-02-2023; Revised; 02-03-2023; Accepted; 08-05-2023

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu agenda utama setiap negara, termasuk negara-negara berkembang. Istilah "negara berkembang" merujuk pada negara dengan ekonomi yang sedang berkembang dan sedang dalam proses modernisasi, dan masih berjuang untuk menyelesaikan berbagai tantangan sosial dan ekonomi, termasuk tingkat kemiskinan yang tinggi, infrastruktur yang kurang memadai, dan akses yang terbatas ke pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas (United Nations, 2020). Oleh karena itu, agenda pembangunan di negara berkembang sangat penting dan mencakup berbagai sektor penting seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Berdasarkan kerangka kerja yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme (UNDP, 2020), agenda pembangunan di negara berkembang sering kali melibatkan tujuan yang melampaui pertumbuhan ekonomi dan mencakup peningkatan inklusivitas dan keberlanjutan. Tujuan ini mencerminkan pengakuan bahwa pembangunan yang sukses harus merangkul semua sektor



masyarakat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, banyak negara berkembang merujuk pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dari PBB sebagai kerangka kerja untuk agenda pembangunan mereka. SDGs mencakup 17 tujuan yang mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, hingga peningkatan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial (UN, 2015).

Secara teoretis, agenda pembangunan di negara berkembang dipandu oleh berbagai teori pembangunan. Misalnya, teori modernisasi berargumen bahwa pembangunan adalah proses linear dan universal yang melibatkan transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern (Rostow, 1960). Sementara itu, teori ketergantungan menekankan bahwa negara-negara berkembang sering kali terperangkap dalam suatu "struktur ketergantungan" dengan negara-negara maju, yang menghambat perkembangan mereka (Frank, 1966). Teori pembangunan lainnya, seperti teori pembangunan berkelanjutan, menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan konservasi lingkungan (WCED, 1987).

Setiap teori menawarkan pandangan yang berbeda tentang proses dan tujuan pembangunan, semua teori ini memberikan wawasan penting tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara berkembang dalam merumuskan dan melaksanakan agenda pembangunan mereka. Dalam konteks ini, agenda pembangunan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana pertumbuhan tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup bagi semua warga, dan bagaimana pertumbuhan tersebut dapat terjadi tanpa merusak lingkungan dan sumber daya alam yang berharga.

Konteks ini, Pemerintah memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Peran ini dapat berkisar dari penyediaan infrastruktur publik, perlindungan hak-hak properti, pengaturan aktivitas ekonomi, hingga intervensi langsung dalam perekonomian (Acemoglu & Robinson, 2012). Pembangunan di negara berkembang biasanya melibatkan transformasi yang signifikan dan meluas dalam struktur perekonomian, yang membutuhkan pengelolaan dan koordinasi oleh pemerintah. Daron Acemoglu, seorang ekonom terkemuka dan profesor di MIT, telah melakukan penelitian luas tentang peran institusi, termasuk pemerintah, dalam proses pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Menurut Acemoglu dan Robinson (2012), keberhasilan atau kegagalan pembangunan suatu negara secara signifikan dipengaruhi oleh "institusi inklusif" atau "institusi ekstraktif" yang ada dalam negara tersebut.

Institusi inklusif adalah struktur politik dan ekonomi yang memberi individu insentif dan kemampuan untuk berinovasi, berinvestasi, dan mengembangkan kapasitas ekonomi mereka. Institusi ini menciptakan pasar yang kompetitif dan sistem politik yang cukup terbuka dan pluralistik, memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota masyarakat. Institusi inklusif juga mencegah sekelompok kecil orang dari mendominasi sumber daya politik dan ekonomi dan menggunakan kekuatan tersebut untuk keuntungan mereka sendiri.

Di sisi lain, institusi ekstraktif adalah struktur yang menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan kekayaan dan memungkinkan sekelompok kecil orang untuk mengeksploitasi kekuasaan ekonomi dan politik untuk keuntungan pribadi mereka. Acemoglu dan Robinson berpendapat bahwa institusi ekstraktif menghambat perkembangan ekonomi jangka panjang dengan mencegah inovasi dan kompetisi yang sehat. Dalam konteks ini, peran pemerintah dalam agenda pembangunan negara berkembang sangat penting. Pemerintah, sebagai institusi politik utama, berperan dalam menciptakan dan menjaga institusi inklusif yang mendukung perkembangan ekonomi. Pemerintah dapat melakukan ini dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan peraturan yang mempromosikan persaingan dan inovasi, melindungi hak-hak properti, dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama ke sumber daya dan peluang. Namun, pemerintah juga dapat menjadi bagian dari masalah jika mereka menjadi institusi ekstraktif yang mengeksploitasi sumber daya dan kekayaan negara untuk keuntungan pribadi. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi dapat terhambat dan agenda pembangunan dapat gagal. Oleh karena itu, menurut Acemoglu dan Robinson, peran pemerintah dalam agenda pembangunan di negara berkembang harus melibatkan transformasi institusi ekstraktif menjadi institusi inklusif dan melindungi institusi inklusif tersebut dari ancaman korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Berlandaskan permasalahan dan tantangan agenda pembangunan negara berkembang yang menuntut peran pemerintah. Salah satu pendekatan yang menarik untuk menjadi landasan dalam



melihat permasalahan Peran Pemerintah dalam agenda pembangunan negara berkembang adalah Pendekatan Sistem. Pendekatan sistem dalam pembangunan merujuk pada pemahaman bahwa berbagai elemen dalam masyarakat dan ekonomi suatu negara saling terkait dan berinteraksi satu sama lain dalam cara yang kompleks. Ini adalah cara untuk melihat "gambaran besar" dari proses pembangunan dan memahami bagaimana berbagai faktor dan sektor saling mempengaruhi (Boulding, 1956). Di dalamnya, pemerintah memiliki peran penting sebagai regulator, fasilitator, dan pemangku kepentingan utama dalam sistem ini.

Secara teoretis, pendekatan sistem memandang pembangunan sebagai proses dinamis yang melibatkan interaksi antara berbagai sektor dan institusi dalam suatu negara. Ini mencakup interaksi antara sektor publik dan swasta, antara sektor formal dan informal, dan antara berbagai level pemerintahan dan masyarakat (Senge, 1990). Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan dan mengelola interaksi ini untuk memastikan bahwa mereka berkontribusi pada tujuan pembangunan yang diinginkan.

Konteks negara berkembang, peran pemerintah dalam pendekatan sistem mungkin melibatkan beberapa fungsi kunci. Pertama, pemerintah berfungsi sebagai regulator, menciptakan kerangka hukum dan peraturan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Ini bisa melibatkan perlindungan hak-hak properti, pengaturan pasar, dan pengimplementasian standar lingkungan dan sosial (North, 1990). Kedua, pemerintah berperan sebagai fasilitator, memberikan infrastruktur dan layanan publik yang mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ini bisa mencakup penyediaan infrastruktur seperti jalan dan listrik, pendidikan dan pelatihan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial (World Bank, 2018). Ketiga, pemerintah berfungsi sebagai pemangku kepentingan utama dalam sistem, mewakili kepentingan masyarakat luas dan memastikan bahwa keuntungan dan beban pembangunan dibagi secara adil (Stiglitz, 1998). Ini bisa melibatkan kebijakan redistributif, regulasi untuk melindungi konsumen dan pekerja, dan intervensi untuk melawan ketidaksetaraan dan kemiskinan.

Namun, peran pemerintah dalam pendekatan sistem juga melibatkan tantangan. Misalnya, memerlukan koordinasi dan manajemen yang efektif antara berbagai departemen dan level pemerintahan, dan keterlibatan yang berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Selain itu, pendekatan sistem juga menekankan pentingnya adaptasi dan pembelajaran, karena sistem dan lingkungan dalam mana mereka beroperasi terus berubah dan berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemodelan untuk dapat menangkap berbagai variabel penting yang dapat mendukung atau menghambat peran pemerintah dalam agenda pembangunan negara berkembang.

Pengembangan model sistem politik merupakan salah satu bagian dari agenda pembangunan yang bertujuan untuk mengkaji dan mengawasi peran pemerintah dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi yang mempunyai tujuan untuk menangkap mekanisme yang sangat penting dalam struktur keputusan pada organisasi politik dimana kapasitasnya dalam menjalankan keputusan strategi dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah secara signifikan dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkesinambungan. Model yang menjadi focus pembahasan pada bagian ini merupakan hasil dari percobaan model sebelumnya dimana berkaitan dengan proses yang terkait dalam fungsi pemerintah untuk memahami sejauh-mana kondisi organisasi berpengaruh terhadap komitmen pemerintah dalam memberikan kesejahteraan pada masyarakat yang menjadi rakyatnya. Model tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan pemerintah dengan semakin intensif dan luas rentang pengawasan yang dilakukan untuk membatasi hak-hak sipil dalam rangka secara tujuannya untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat menciptakan lingkaran umpan balik (*feedback loop*) yang kuat dan terjalin erat untuk membatasi dukungan pemerintah terhadap penciptaan kesejahteraan masyarakat meskipun pemerintahan tersebut merupakan pemerintahan yang secara sadar memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan atau sebaliknya.

Artikel ini bertujuan untuk melakukan uji pemodelan terhadap instrumen kontrol peran pemerintah menggunakan metodologi sistem dinamis. Pendekatan sistem dinamis dalam pembangunan adalah metode yang menggunakan model dan simulasi untuk menganalisis dan memahami bagaimana sistem kompleks berubah dan berkembang sepanjang waktu (Forrester, 1961). Dalam konteks pembangunan di negara berkembang, pendekatan ini melihat pemerintah dan peran yang dimainkannya sebagai bagian dari sistem sosial-ekonomi yang lebih luas yang berinteraksi dan berubah sepanjang



waktu. Dalam sistem dinamis, elemen-elemen dari sistem tersebut (misalnya, institusi, pasar, komunitas) saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam pola umpan balik yang rumit dan seringkali tidak terduga. Oleh karena itu, perubahan kecil pada satu bagian dari sistem dapat memiliki efek yang besar pada seluruh sistem, dan sebaliknya (Senge, 1990). Menurut pendekatan sistem dinamis, peran pemerintah dalam pembangunan melampaui peran tradisional sebagai regulator atau penyedia layanan. Sebaliknya, pemerintah dilihat sebagai pemangku kepentingan utama dalam sistem yang kompleks dan dinamis, memiliki peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi pola interaksi dan umpan balik dalam sistem tersebut. Berlandaskan pemahaman tersebut, tulisan ini akan membedah peran pemerintah negara berkembang dalam menjalankan Agenda Pembangunan.

Peran Pemerintah dalam Pendekatan Sistem Dinamis

Pembangunan ekonomi dan sosial merupakan tujuan utama bagi sebagian besar negara, dan pemerintah memainkan peran yang krusial dalam pencapaian tujuan ini. Peran ini bervariasi tergantung pada model pembangunan yang diterapkan dan konteks sosial, politik, dan ekonomi tertentu dari sebuah negara. Dalam teori ekonomi klasik dan neoklasik, pemerintah sering kali dilihat sebagai regulator dan pengawas ekonomi. Adam Smith, misalnya, berpendapat bahwa tugas pemerintah harus terbatas pada tiga hal utama: pertahanan negara, penegakan hukum, dan pembangunan infrastruktur yang esensial (Smith, 1776). Pada abad ke-20, teori ekonomi neoklasik, yang mewarisi banyak pemikiran dari Smith, tetap memandang peran pemerintah sebagai "pengawas malam" atau "state minimal" yang membiarkan "invisible hand" atau mekanisme pasar bekerja (Friedman, 1962).

Namun, teori pembangunan modern dan keynesian memberikan peran yang lebih signifikan kepada pemerintah. Menurut Keynes, pemerintah harus berintervensi dalam ekonomi, terutama dalam periode resesi, untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi (Keynes, 1936). Dalam teori pembangunan modern, pemerintah memainkan peran sentral dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial melalui berbagai cara seperti investasi dalam infrastruktur, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan kesehatan, serta dengan mendukung inovasi dan perkembangan teknologi (Rostow, 1960). Dari perspektif teori dependensi dan teori sistem dunia, peran pemerintah dalam pembangunan di negara-negara berkembang menjadi sangat penting untuk mengatasi ketimpangan global dan memfasilitasi transformasi struktural (Frank, 1966; Wallerstein, 1974). Dalam konteks ini, pemerintah harus berperan aktif dalam memandu ekonomi dan melindungi industri nasional dari persaingan internasional yang tidak seimbang.

Data empiris juga mendukung peran penting pemerintah dalam pembangunan. Menurut data dari Bank Dunia (2019), investasi pemerintah dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Studi kasus dari berbagai negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan China menunjukkan bahwa intervensi pemerintah yang strategis dan efektif bisa memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pembangunan sosial (Woo-Cumings, 1999; Wade, 1990; Naughton, 2007). Namun, peran pemerintah dalam pembangunan harus selalu disesuaikan dengan konteks dan kondisi khusus dari setiap negara. Faktor-faktor seperti kapasitas institusional, kondisi sosial dan ekonomi, serta hubungan internasional, semua mempengaruhi bagaimana dan sejauh mana pemerintah dapat dan harus berperan dalam pembangunan.

Pendekatan sistem dinamis merupakan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi dalam menganalisis fenomena, termasuk dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam sistem yang kompleks ini, dan perannya dalam pembangunan dipahami dalam kaitannya dengan elemen-elemen lain dalam sistem tersebut (Forrester, 1961). Dalam pendekatan sistem dinamis, pemerintah tidak hanya dianggap sebagai pengambil keputusan dalam pembuatan kebijakan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem yang lebih besar yang mencakup pasar, lembaga-lembaga, dan aktor-aktor lainnya. Kebijakan pemerintah dan aksi-aksinya terkait pembangunan berinteraksi dengan elemen-elemen lain dalam sistem tersebut dalam pola umpan balik atau "feedback loop" yang kompleks.

Misalnya, kebijakan investasi pemerintah dalam infrastruktur atau pendidikan dapat mempengaruhi dinamika pasar, seperti aktivitas ekonomi atau pola permintaan tenaga kerja. Sebaliknya, perubahan dalam pasar, seperti inovasi teknologi atau pertumbuhan ekonomi, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Demikian pula, interaksi pemerintah dengan lembaga-lembaga



dan aktor-aktor lainnya, seperti organisasi internasional, sektor swasta, atau masyarakat sipil, juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan dan aksi pemerintah.

Pendekatan ini memandang peran pemerintah dalam pembangunan sebagai peran yang dinamis dan adaptif, bukan statis atau tetap. Pemerintah harus mampu beradaptasi dan merespons perubahan dalam sistem, baik perubahan eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi global atau perubahan internal seperti perubahan demografi atau norma sosial (Stermann, 2000). Data empiris mendukung pandangan ini. Sebagai contoh, studi kasus tentang reformasi kebijakan di China menunjukkan bagaimana pemerintah telah beradaptasi dengan perubahan dalam sistem ekonomi dan sosial, dan bagaimana reformasi ini telah membantu memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial (Naughton, 2007). Studi serupa tentang transformasi ekonomi di Korea Selatan juga menunjukkan bagaimana pemerintah telah memainkan peran kunci dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan perubahan dalam sistem ekonomi dan sosial (Woo-Cumings, 1999). Secara keseluruhan, pendekatan sistem dinamis menawarkan cara baru dan lebih holistik dalam memahami peran pemerintah dalam pembangunan. Ini tidak hanya menekankan pentingnya kebijakan dan aksi pemerintah, tetapi juga interaksi dan hubungan antara pemerintah dan elemen-elemen lain dalam sistem.

Salah satu elemen penting dalam pendekatan dinamis terkait agenda pembangunan adalah instrumen kontrol. Dalam konteks sistem dinamis, instrumen kontrol didefinisikan sebagai mekanisme atau alat yang digunakan oleh aktor dalam sistem (dalam hal ini pemerintah) untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku sistem secara keseluruhan. Dalam agenda pembangunan, instrumen kontrol yang digunakan oleh pemerintah bisa berupa kebijakan publik, regulasi, intervensi langsung, atau mekanisme insentif dan disinsentif. Instrumen kontrol ini digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi dan mengarahkan proses pembangunan sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah ditentukan. Dalam pendekatan sistem dinamis, penggunaan instrumen kontrol ini bukanlah suatu tindakan yang statis, melainkan proses yang dinamis dan beradaptasi dengan kondisi dan perubahan dalam sistem.

Ada beberapa kategori instrumen kontrol yang sering digunakan dalam konteks pembangunan. Pertama, kebijakan Publik dan Regulasi, Pemerintah dapat menggunakan kebijakan dan regulasi untuk mempengaruhi perilaku aktor lain dalam sistem, seperti perusahaan, organisasi, dan individu. Misalnya, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan pajak untuk mendorong investasi dalam sektor-sektor tertentu, atau regulasi lingkungan untuk melindungi sumber daya alam (Stermann, 2000). Kedua, Intervensi Langsung, Pemerintah juga dapat melakukan intervensi langsung dalam sistem, seperti investasi dalam infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan, atau implementasi program-program sosial atau ekonomi tertentu. Intervensi langsung ini dapat memiliki dampak langsung dan signifikan pada dinamika sistem dan proses pembangunan (World Bank, 2019). Terakhir, Mekanisme Insentif dan Disinsentif, Pemerintah dapat menggunakan mekanisme insentif dan disinsentif untuk mempengaruhi perilaku aktor lain dalam sistem. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal atau subsidi untuk mendorong aktivitas ekonomi tertentu, atau disinsentif seperti sanksi atau denda untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan (Stavins, 2003). Dalam pendekatan sistem dinamis, penggunaan instrumen kontrol ini harus dilakukan secara strategis dan adaptif, dengan mempertimbangkan interaksi dan umpan balik dalam sistem. Sebagai contoh, studi oleh Stermann (2000) menunjukkan bagaimana penggunaan instrumen kontrol dalam manajemen sumber daya alam harus mempertimbangkan umpan balik dan keterkaitan antara faktor-faktor ekologis, ekonomi, dan sosial.

Instrumen kontrol menjadi variabel penting dikarenakan dalam agenda pembangunan, pemerintah harus dapat mengelola masyarakat di dalam sistem politik yang menjadi *platform* penting untuk memproduksi ekosistem kebijakan yang menopang agenda pembangunan. Sistem politik memiliki peran penting dalam agenda pembangunan, terutama dalam konteks pendekatan sistem dinamis. Dalam sistem ini, sistem politik adalah salah satu elemen kunci yang saling berinteraksi dengan elemen lain seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan, membentuk pola umpan balik yang kompleks dan dinamis. Sistem politik, dalam konteks ini, merujuk pada struktur dan proses politik, termasuk lembaga-lembaga politik (seperti pemerintah dan partai politik), norma dan aturan yang mengatur aktivitas politik, dan perilaku aktor politik. Semua elemen ini berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam pola yang seringkali rumit dan tidak terduga (Easton, 1953).

Pada agenda pembangunan, sistem politik berfungsi sebagai alat untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan dan program pembangunan. Misalnya, sistem politik



dapat mempengaruhi alokasi sumber daya, prioritas pembangunan, dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan standar (Grindle, 2004). Selain itu, sistem politik juga mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi dalam sistem secara lebih luas. Misalnya, stabilitas politik dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan konflik politik atau ketidakstabilan dapat merusak pembangunan dan memperburuk ketidaksetaraan (Alesina et al., 1996). Namun, dalam pendekatan sistem dinamis, sistem politik juga dipahami sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dan saling tergantung. Ini berarti bahwa perubahan dalam elemen lain dari sistem, seperti perubahan ekonomi atau sosial, juga dapat mempengaruhi sistem politik. Misalnya, pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi struktur politik dan perilaku aktor politik, sedangkan perubahan sosial atau demografi dapat mempengaruhi norma dan aturan politik (Przeworski et al., 2000). Data empiris mendukung pandangan ini. Sebagai contoh, studi kasus tentang transisi demokrasi di berbagai negara menunjukkan bagaimana perubahan ekonomi dan sosial telah mempengaruhi proses politik dan dinamika kekuasaan (Acemoglu and Robinson, 2006). Pendekatan sistem dinamis menawarkan cara baru dan lebih holistik dalam memahami peran sistem politik dalam agenda pembangunan. Ini menekankan pentingnya memahami sistem politik sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dan saling tergantung, dan mempertimbangkan bagaimana sistem politik dan elemen lain dalam sistem saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.

Sistem politik terdiri dari berbagai aktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh agenda pembangunan. Dalam pendekatan sistem dinamis, peran dan interaksi antara aktor-aktor ini sangat penting karena mereka membentuk pola umpan balik dan interdependensi yang mempengaruhi dinamika sistem secara keseluruhan. Berbagai pemangku kepentingan di era globalisasi membuat sistem politik memuat kompleksitas yang sangat kontradiktif dengan kekakuan birokrasi pemerintahan. Sedangkan pemerintah, selaku aktor yang memiliki peran sentral dalam agenda pembangunan sebagai pembuat kebijakan dan pengawas pembangunan. Pemerintah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan, dan mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan. Peran pemerintah ini seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor politik seperti ideologi politik, sistem pemilihan, dan dinamika kekuasaan politik (Bardhan, 2002).

Selain itu, pemerintah juga harus berkaitan dengan berbagai aktor lain seperti Partai politik juga berperan penting dalam agenda pembangunan, terutama dalam sistem demokrasi. Partai politik membentuk agenda politik dan membantu menentukan prioritas pembangunan. Partai politik juga berperan dalam mempengaruhi opini publik dan mendapatkan dukungan untuk agenda pembangunan (Mainwaring & Torcal, 2006). Kemudian, Aktor non-pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil, kelompok advokasi, dan sektor swasta juga berperan penting dalam sistem politik dan pembangunan. Aktor-aktor ini dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan dan implementasi pembangunan, baik melalui advokasi dan kampanye, maupun melalui partisipasi langsung dalam pembangunan (Diamond, 1999). Dalam pendekatan sistem dinamis, interaksi dan umpan balik antara aktor-aktor ini dipandang sebagai faktor penting yang mempengaruhi dinamika sistem politik dan pembangunan. Misalnya, keputusan pemerintah tentang pembangunan dapat dipengaruhi oleh tekanan dari partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah.

Kecenderungan tersebut menciptakan alokasi sumber daya nasional yang substansial pada upaya penciptaan *instrument control* dengan menerima sebuah konsekuensi pada kelangkaan sumber daya ekonomi yang berakibat pada kondisi tidak hanya melemahnya pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya sebuah pembangkangan. Suatu pemerintah kondisi internalnya terdapat pembangkang berdampak pada menurunnya dukungan dan perhatian pada agenda pembangunan yang menjadi tujuan dari sistem politik yang dibangun, hal tersebut kemudian menciptakan ketidakstabilan politik yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pemodelan sistem politik di Negara berkembang merupakan tugas yang berat dengan manfaat yang terbatas. Sistem tertutup yang dihasilkan dari model didalamnya terdiri dari proses alokasi sumber daya untuk kesejahteraan dan instrumen kontrol pemerintah dan tekanan utama yang mempengaruhi proses tersebut.

Secara sederhana sistem politik di Negara berkembang mempunyai tiga aktor utama, yakni: pemerintah, pembangkang dan masyarakat yang mendambakan kesejahteraan dalam hidup mereka. Sedangkan, pemerintah memegang kekuasaan politik dimana pembangkang yang makar dari partisipasi dalam perubahan politik yang menginginkan penggulingan pemerintah dan mengambil alih kekuasaan



atau sebuah rekonfigurasi status-quo secara radikal. Masyarakat yang menginginkan kesejahteraan tetapi seringkali tidak dapat berpartisipasi dalam keputusan politik. Gambaran rinci mengenai aktor-aktor tersebut dapat kita lihat dalam elaborasi di bawah ini (Tabel.1).

Tabel 1. Peran dan Motivasi Aktor Utama dalam Sistem Politik

Aktor	Peran	Motivasi Memainkan Peran
Pemerintah mencari kontrol yang memadai	Mengalokasikan sumber daya untuk barang sosial dan kontrol	Tekanan relative untuk mendukung pembangunan sosial dan mempertahankan kontrol
Pembangkang mencari kekuasaan	Melakukan tindakan kekerasan untuk melawan pemerintah dan menghancurkan kontrol pemerintah	Akomodasi publik terhadap pembangkang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah
Masyarakat mencari kesejahteraan	Mendukung pemerintah dan mentolelir pembangkang	Tingkat ekonomi dan kesejahteraan

Aktor-aktor yang telah dielaborasi di atas mempunyai peran sebagai aktor yang rasional dan peran yang mereka lakukan akan mempunyai pengaruh baik itu langsung ataupun tidak langsung pada: (a) produksi dan konsumsi kepada barang sosial (*Social Goods*) dalam rangka untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, (b) pembentukan dan peluruhan instrumen kontrol untuk mengembangkan jangkauan pemerintah, (c) pembagian sumber daya nasional antara sektor ekonomi untuk memproduksi barang sosial (*social goods*) dan sektor pengawasan (*control*) untuk menciptakan instrumen pengawasan, serta berpengaruh juga pada (d) timbul dan tenggelamnya pembangkang yang dapat mengurangi kontrol pemerintah. Berbagai proses produksi, peluruhan dan alokasi sumber daya tergabung dalam sebuah model yang akan dijelaskan dalam pembahasan artikel ini.

PEMBAHASAN

Modalitas Kontrol: Pengawasan Dalam Alokasi Sumberdaya Di Sektor Ekonomi

Instrumen kontrol kebijakan memainkan peran penting dalam agenda pembangunan. Dalam pendekatan sistem dinamis, instrumen kontrol kebijakan adalah mekanisme atau alat yang digunakan oleh pemerintah (atau aktor lain yang berwenang) untuk mempengaruhi perilaku sistem secara keseluruhan. Pendekatan sistem dinamis menekankan bahwa kebijakan bukanlah suatu tindakan yang statis, melainkan proses yang dinamis dan beradaptasi dengan kondisi dan perubahan dalam sistem. Artinya, penggunaan instrumen kontrol kebijakan harus dapat merespons dan beradaptasi dengan dinamika dan umpan balik dalam sistem.

Dalam penelitian ini, peneliti fokus hanya pada aspek instrumen kontrol terkait alokasi sumberdaya untuk sektor ekonomi di dalam Agenda Pembangunan. Model kontrol alokasi sumber daya dan pengawasan dalam agenda pembangunan adalah konsep kunci dalam ekonomi pembangunan dan perencanaan strategis. Dalam pendekatan sistem dinamis, kedua elemen ini memainkan peran penting dalam mempengaruhi dan merespons dinamika yang kompleks dan umpan balik dalam sistem pembangunan ekonomi. Alokasi sumber daya merujuk kepada bagaimana sumber daya ekonomi (misalnya tenaga kerja, modal, dan bahan mentah) dialokasikan di antara berbagai sektor dan aktivitas ekonomi. Dalam pendekatan sistem dinamis, alokasi sumber daya ini bukanlah suatu tindakan yang statis, melainkan proses yang dinamis dan berkelanjutan yang beradaptasi dengan perubahan kondisi dan prioritas (Barro & Sala-i-Martin, 2004). Alokasi sumber daya yang efisien adalah kunci untuk pembangunan ekonomi. Namun, alokasi sumber daya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kondisi pasar, dan faktor-faktor lainnya. Misalnya, kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, dan regulasi dapat mempengaruhi alokasi sumber daya dengan memberikan insentif atau disinsentif untuk berbagai sektor atau aktivitas ekonomi (Stavins, 2003).

Dalam rangka memastikan alokasi sumber daya didistribusikan secara efisien dan tepat, dibutuhkan elemen pengawasan terhadap sistem politik yang menjadi landasan penting Agenda Pembangunan. Pengawasan adalah elemen penting lainnya dalam agenda pembangunan. Pengawasan



melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja berbagai sektor dan aktivitas ekonomi, serta implementasi kebijakan dan program pembangunan. Dalam pendekatan sistem dinamis, pengawasan adalah bagian penting dari mekanisme umpan balik yang memungkinkan sistem untuk beradaptasi dan merespons perubahan kondisi dan hasil (Stermann, 2000). Pengawasan dapat melibatkan berbagai metode dan alat, termasuk pengumpulan dan analisis data, audit, dan evaluasi. Pengawasan yang efektif memungkinkan pemerintah dan aktor lainnya untuk mengidentifikasi dan merespons masalah atau peluang, dan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan pada kebijakan dan program pembangunan. Dalam konteks ini, pendekatan sistem dinamis menekankan pentingnya umpan balik dan adaptasi dalam proses alokasi sumber daya dan pengawasan. Model kontrol ini dapat membantu dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Pengawasan dalam konteks alokasi sumber daya ekonomi merujuk kepada proses pemantauan dan evaluasi bagaimana sumber daya dialokasikan di antara berbagai sektor dan aktivitas ekonomi, dan bagaimana alokasi ini mempengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan. Dalam pendekatan sistem dinamis, pengawasan berperan sebagai mekanisme umpan balik yang memungkinkan sistem untuk beradaptasi dan merespons perubahan kondisi dan hasil (Stermann, 2000). Pada tingkat paling dasar, pengawasan melibatkan pengumpulan dan analisis data tentang alokasi sumber daya dan kinerja ekonomi. Data ini dapat mencakup berbagai indikator, termasuk produktivitas, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan sebagainya. Dengan memantau dan menganalisis data ini, pemerintah dan aktor lainnya dapat mengidentifikasi tren, masalah, atau peluang, dan merumuskan respon yang tepat (Barro & Sala-i-Martin, 2004).

Pengawasan juga melibatkan evaluasi efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya. Misalnya, pemerintah dapat mengevaluasi apakah alokasi sumber daya ke sektor-sektor tertentu berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan, atau apakah ada sektor atau aktivitas lain yang mungkin memerlukan lebih banyak sumber daya. Evaluasi ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan alokasi sumber daya yang lebih efektif (Stavins, 2003). Selain itu, pengawasan juga dapat melibatkan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan dan program pembangunan. Misalnya, pemerintah dapat memantau sejauh mana kebijakan alokasi sumber daya telah diimplementasikan, dan bagaimana kebijakan ini mempengaruhi alokasi sumber daya dan kinerja ekonomi. Dengan demikian, pengawasan dapat membantu dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembangunan (World Bank, 2011).

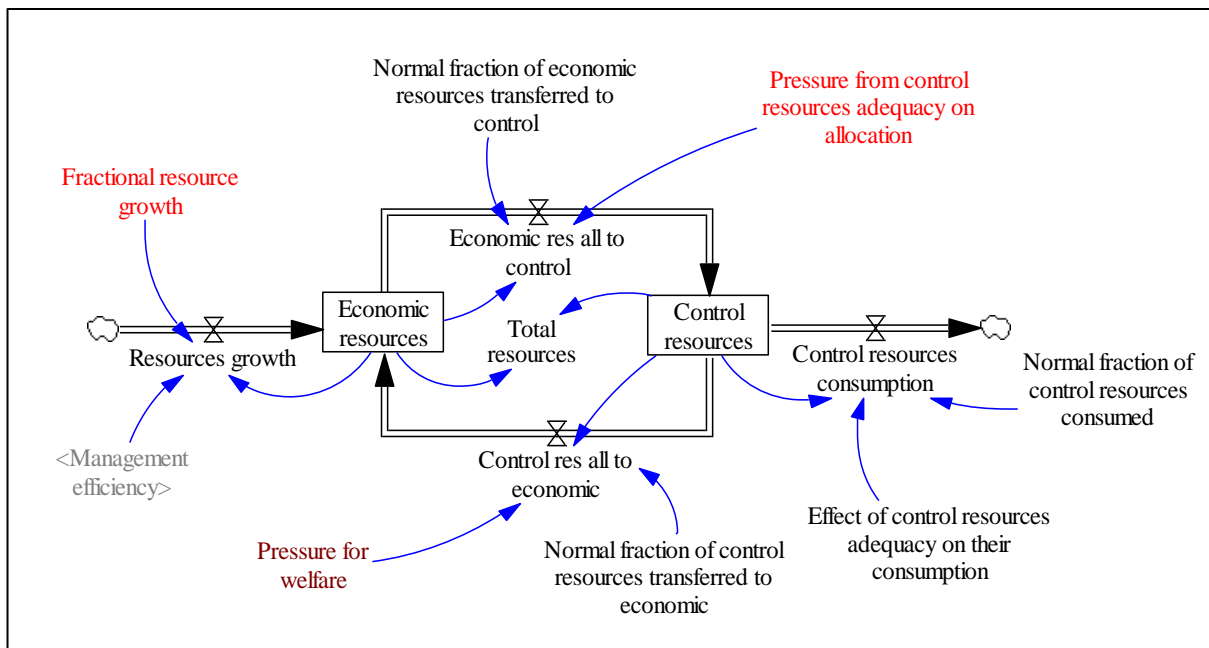
Untuk memberikan pemahaman lebih konkret mengenai bagaimana pengawasan untuk alokasi sumber daya sektor ekonomi dilakukan dalam pendekatan sistem dinamis, kita bisa melihat contoh kasus pembangunan ekonomi di Cina. Negara ini telah menerapkan pendekatan pengawasan yang dinamis dalam proses transformasi ekonominya dari sistem terpusat menjadi ekonomi pasar yang lebih terbuka (Naughton, 2007). Pemerintah Cina telah memainkan peran kunci dalam mengawasi dan mengendalikan alokasi sumber daya ekonomi. Sejak awal reformasi ekonomi pada akhir 1970-an, pemerintah telah mengumpulkan dan menganalisis data tentang performa berbagai sektor ekonomi, dan mengadopsi berbagai kebijakan untuk merangsang pertumbuhan dan mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor yang memiliki potensi terbesar (Brandt & Rawski, 2008). Pengawasan ini melibatkan evaluasi reguler dan kajian terhadap kinerja sektor-sektor ekonomi, termasuk analisis efisiensi alokasi sumber daya dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Data dan informasi yang diperoleh dari proses pengawasan ini kemudian digunakan untuk menyesuaikan dan memperbaiki kebijakan dan strategi pembangunan (Naughton, 2007).

Contoh spesifik dari praktik pengawasan ini bisa dilihat dalam bagaimana pemerintah Cina menangani sektor manufaktur. Pada awal reformasi ekonomi, pemerintah mengidentifikasi bahwa sektor manufaktur memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan modernisasi ekonomi. Melalui proses pengawasan yang cermat, pemerintah kemudian mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke sektor ini, termasuk investasi dalam infrastruktur dan pelatihan tenaga kerja, serta insentif kebijakan seperti pembebasan pajak dan subsidi untuk perusahaan manufaktur (Brandt & Rawski, 2008). Hasil dari pengawasan ini adalah bahwa sektor manufaktur di Cina telah berkembang pesat dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, membantu mengangkat jutaan orang dari kemiskinan dan mengubah Cina menjadi perekonomian terbesar kedua di dunia (World Bank, 2019). Ini adalah contoh konkret tentang bagaimana pendekatan pengawasan dalam sistem dinamis dapat digunakan dalam konteks pembangunan ekonomi. Melalui pengawasan berkelanjutan dan adaptif, pemerintah dapat merespons



perubahan kondisi dan hasil, dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif.

Contoh kasus di atas dapat menjadi gambaran kualitatif terkait pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan untuk mengontrol alokasi sumber daya dalam sektor ekonomi. Berlandaskan simulasi yang dilakukan dalam penelitian ini melalui platform Vensim. Terlah terbukti bahwa pengawasan adalah fungsi kontrol yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi yang dikontrol oleh pemerintah. Melalui konsistensi tersebut, pertumbuhan ekonomi negara berkembang dapat dicapai melalui pendekatan yang adaptif dan dinamis.



Gambar 1. Model Kontrol Alokasi Sumber Daya untuk Sektor Ekonomi dan Pengawasan

Gambar 1. ini memberikan sebuah ilustrasi mengenai proses alokasi sumber daya nasional antara sektor ekonomi dan sektor pengawasan. Sumber daya tersebut memiliki pilihan untuk dapat dialihkan dari satu sektor ke sektor lainnya berdasarkan asas kebutuhan yang diinginkan oleh masing – masing sektor. Sumber daya yang diletakkan pada sektor ekonomi akan tumbuh atau berkembang pada nilai eksogen *rate* bersih yang secara spesifik ditentukan dan perkembangan selanjutnya akan bergantung pada fasilitasi yang disediakan oleh efisiensi manajemen yang dapat diciptakan oleh lingkungan strategis pengawasan pemerintah yang luas. Sedangkan sumber daya yang diperuntukkan untuk sektor pengawasan digunakan dalam bentuk *rate* bersih secara proporsional dalam tataran level yang ada sesuai dengan proporsi kecukupan pemerintah yang bersangkutan.

Berlandaskan pada alokasi sumber daya untuk sektor ekonomi dan pengawasan diatas, tugas akhir ini membatasi pembahasannya hanya pada melihat 3 konstanta (*Constant*) yakni: (1) *fractional resource growth* yang mempengaruhi *rate resources growth*, (2) *Pressure from control resources adequacy on allocation* yang mempengaruhi *rate economic resources allocated to control*, (3) *pressure for welfare* yang mempengaruhi *rate control resources allocated to economic sector*. Ketiga fokus pembahasan ini memiliki data awal yang patut kita ketahui, sebagai berikut:

Model Sistem Politik 1 (Skenario 1)	Model Sistem Politik 2 (Skenario 2)
Level Economic Resources : 30	Level Economic Resources : 30
Level Control Resurces : 50	Level Control Resurces : 50
<i>Fractional resource growth</i> : 0,02	<i>Fractional resource growth</i> : 0,04
<i>Pressure from control resources</i>	<i>Pressure from control resources</i>



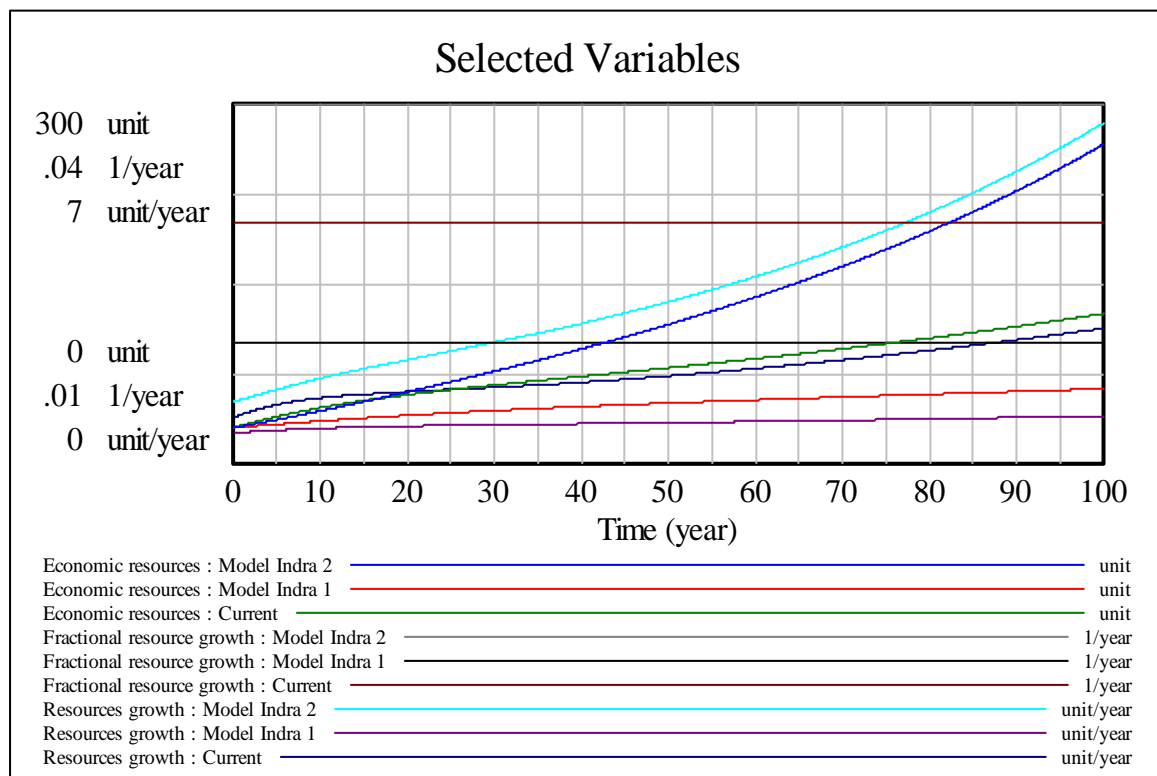
<i>adequacy on allocation : 1</i>	<i>adequacy on allocation : 0,6</i>
<i>Pressure for welfare : 1</i>	<i>Pressure for welfare: 0,7</i>

Constant fractional resource growth yang mempengaruhi rate resources growth.

Resources growth sebagai sebuah rate dipengaruhi oleh *level economic resources*, *constant fractional resource growth* dan *management efficiency* sebagai sebuah *shadow variable*. *Rate resources growth* mempunyai persamaan:

$$\text{Fractional Resources Growth} \times \text{Economic Resources} \times \text{Management Efficiency}$$

Berlandaskan persamaan diatas kita dapat melihat bahwa *constant fractional resource growth* memiliki hubungan kausal positif dengan *rate resources growth* ketika *constant fractional resources growth* semakin besar maka *rate resources growth* akan semakin besar pula. Asumsi ini dapat dilihat berdasarkan simulasi dibawah ini:



Dari graphic diatas dapat kita lihat bahwa ketika *Fractional resources growth* (Model Indra 1) ditetapkan sebesar 0,02 maka *Resources Growth* sebesar 0,65 Unit/Tahun pada tahun ke-5, ketika *Fractional resources growth* (Model Indra 2) ditetapkan sebesar 0,04 maka *Resources Growth* sebesar 1,44 Unit/Tahun pada tahun ke-5 dengan besaran awal yang ditetapkan untuk *Level Economic Resources* sebesar 30 Unit.

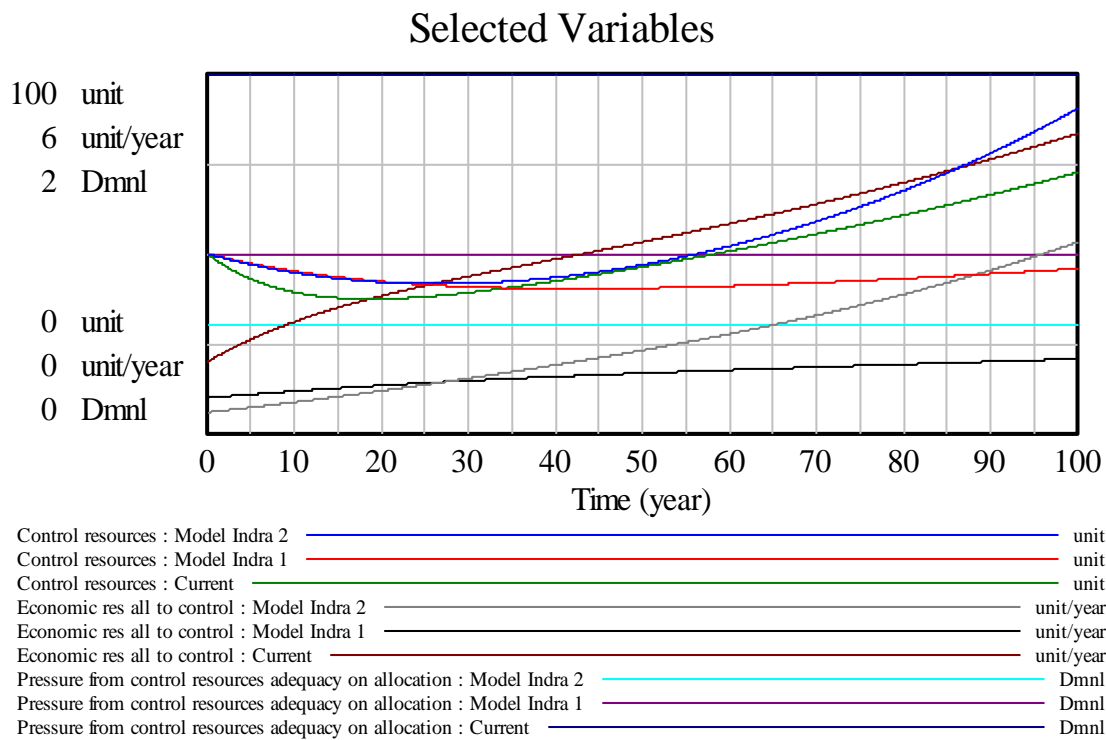
Constant Pressure from control resources adequacy on allocation yang berpengaruh pada rate economic resources allocated to control.

Economic resources allocated to control sebagai sebuah rate dipengaruhi oleh *level economic resources*, *constant Pressure from control resources adequacy on allocation* dan *Normal fraction of economic resources transferred to control* serta mempengaruhi *level control resources*. *Rate Economic resources allocated to control* mempunyai persamaan:



Normal fraction of economic resources transferred to control × Economic Resources × Pressure from control resources adequacy on allocation.

Dari persamaan diatas kita dapat memahami bahwa *constant Pressure from control resources adequacy on allocation* memiliki hubungan kausal positif dengan *rate Economic resources allocated to control* pada saat *constant Pressure from control resources adequacy on allocation* semakin besar akan berakibat *rate Economic resources allocated to control* akan semakin besar. Seperti terlihat pada *graphic* berikut ini:



Dari *graphic* diatas dapat kita lihat bahwa ketika *constant Pressure from control resources adequacy on allocation* (Model Indra 1) ditetapkan sebesar 1 maka *rate Economic resources allocated to control* adalah sebesar 0,658 Unit/Tahun pada tahun ke-5, ketika *constant Pressure from control resources adequacy on allocation* (Model Indra 2) ditetapkan sebesar 0,6 maka *rate Economic resources allocated to control* sebesar 0,439 Unit/Tahun pada tahun ke-5 dengan besaran awal yang ditetapkan untuk *Level Economic Resources* sebesar 30 Unit.

Constant pressure for welfare yang mempengaruhi rate control resources allocated to economic sector.

Control resources allocated to economic sector sebagai sebuah *rate* dipengaruhi oleh *level control resources*, *constant Pressure for welfare* dan *Normal fraction of control resources transferred to economic*. *Rate Control resources allocated to economic sector* mempunyai persamaan:

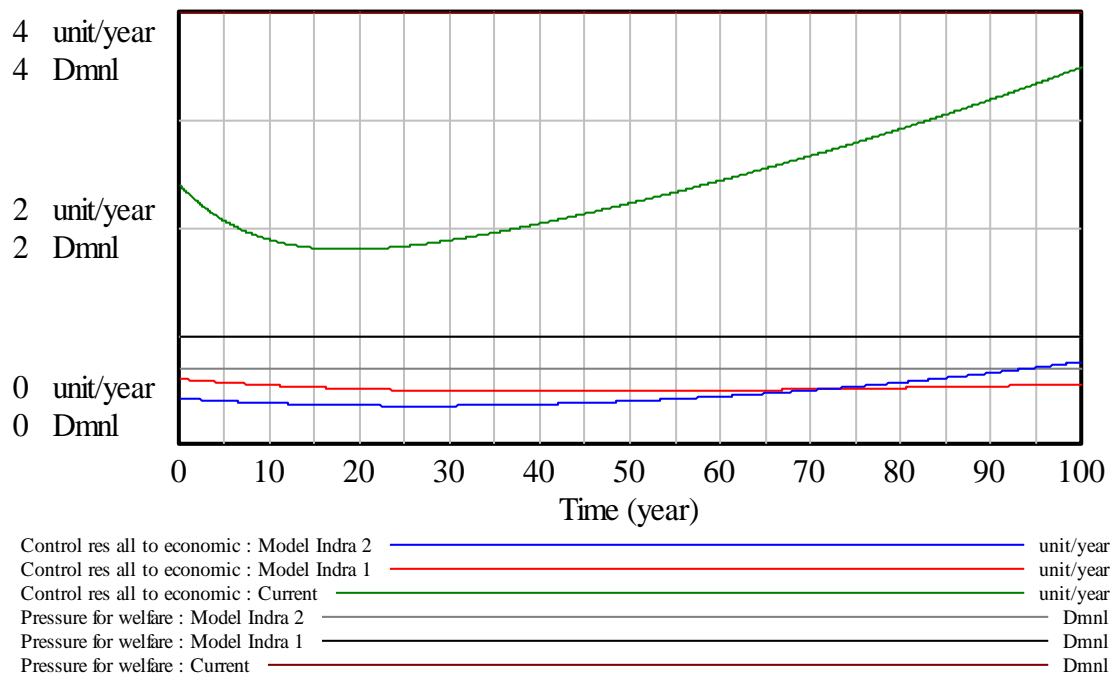
Normal fraction of control resources transferred to economic × Control resources × Pressure for welfare.

Dari persamaan tersebut kita dapat memahami bahwa *constant Pressure for welfare* memiliki hubungan kausal positif dengan *rate Economic resources allocated to economic sector* ketika *constant Pressure*



for welfare semakin besar maka rate Economic resources allocated to control akan semakin besar pula. Seperti terlihat pada graphic berikut ini:

Selected Variables



Dari graphic diatas dapat kita mendapatkan pemahaman bahwa ketika constant Pressure for welfare (model indra 1) ditetapkan sebesar 1 maka rate control resources allocated to economic sector sebesar 0,567 Unit/Tahun pada tahun ke-5, ketika constant Pressure for Welfare (Sistem Politik 2_Indra) ditetapkan sebesar 0,7 maka rate control resources allocated to economic sector sebesar 0,395 Unit/Tahun pada tahun ke-5 dengan besaran awal yang ditetapkan untuk Level Control Resources sebesar 50 Unit.

Modalitas Kontrol Pemerintah: Kebijakan Fiskal Dalam Agenda Pembangunan Negara Berkembang

Kebijakan fiskal, yang mencakup pengeluaran pemerintah dan pendapatan dari pajak, memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam konteks alokasi sumber daya sektor ekonomi. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah memiliki alat untuk mempengaruhi arah dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, dan dapat mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor ekonomi yang dianggap strategis atau membutuhkan dukungan (Barro & Grilli, 1994). Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dalam beberapa cara. Pertama, melalui pengeluaran pemerintah, pemerintah dapat menginvestasikan langsung dalam sektor-sektor tertentu, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang mungkin memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Bose, Haque, & Osborn, 2007). Investasi ini tidak hanya menciptakan pekerjaan dan pendapatan di jangka pendek, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi di jangka panjang. Kedua, melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat memberikan insentif atau hambatan bagi aktivitas ekonomi tertentu. Misalnya, dengan memberikan pembebasan pajak atau insentif pajak bagi industri tertentu, pemerintah dapat mendorong investasi dan pertumbuhan dalam sektor tersebut. Sebaliknya, dengan menaikkan pajak pada kegiatan atau produk tertentu, pemerintah dapat mengurangi konsumsi atau produksi dari sektor tersebut (Mankiw, 2000).

Dalam pendekatan sistem dinamis, peran kebijakan fiskal dalam alokasi sumber daya dipandang dalam konteks interaksi yang kompleks dan dinamis antara berbagai elemen ekonomi dan sosial. Pemerintah perlu memahami dan merespons perubahan dan umpan balik dalam sistem ini untuk membuat keputusan kebijakan fiskal yang efektif (Serman, 2000). Misalnya, pengeluaran pemerintah dalam pendidikan mungkin memiliki efek positif jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Namun, ini juga bisa mempengaruhi



distribusi pendapatan, konsumsi, dan tabungan, serta alokasi sumber daya antara sektor publik dan swasta. Pemerintah perlu mempertimbangkan semua dampak ini dalam merumuskan kebijakan fiskal (Bose, Haque, & Osborn, 2007). Begitu juga, kebijakan pajak memiliki efek umpan balik yang rumit dan seringkali tidak terduga. Misalnya, peningkatan pajak pada produk tembakau mungkin dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi dan memperbaiki kesehatan masyarakat, tetapi juga bisa berdampak pada pendapatan dan pekerjaan di industri tembakau. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kebijakan pajak ini, dan mungkin perlu merumuskan kebijakan lain untuk meredakan dampak negatif (Mankiw, 2000).

Untuk memberikan konteks yang lebih spesifik pada peran kebijakan fiskal dalam alokasi sumber daya sektor ekonomi dalam agenda pembangunan di negara-negara berkembang, kita dapat merujuk ke contoh India. Pada awal 1990-an, India meluncurkan serangkaian reformasi ekonomi yang dirancang untuk membuka ekonomi dan mendorong investasi asing langsung. Salah satu komponen penting dari reformasi ini adalah perubahan dalam kebijakan fiskal, yang memiliki dampak signifikan pada alokasi sumber daya di berbagai sektor ekonomi (Panagariya, 2004). Sebagai bagian dari reformasi, pemerintah India menurunkan tingkat pajak yang tinggi, yang sebelumnya dianggap menghambat investasi dan pertumbuhan. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan reformasi dalam sistem pajak penjualan dan layanan, yang dimaksudkan untuk menyederhanakan struktur pajak dan mengurangi distorsi yang mempengaruhi alokasi sumber daya. Pada sisi pengeluaran, pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk memprioritaskan pengeluaran publik dan mengalokasikan sumber daya lebih banyak ke sektor infrastruktur dan pendidikan. Investasi ini dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang dan pembangunan inklusif.

Dalam konteks sistem dinamis, reformasi kebijakan fiskal India ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai elemen dan umpan balik dalam sistem ekonomi dan sosial. Misalnya, penurunan tingkat pajak dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan pajak dan memberikan pemerintah lebih banyak sumber daya untuk investasi di sektor prioritas. Namun, penurunan tingkat pajak juga berpotensi mengurangi pendapatan pajak jangka pendek dan mempengaruhi keseimbangan fiskal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kebijakan ini dan merumuskan strategi yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kestabilan fiskal. Pada sisi pengeluaran, investasi dalam infrastruktur dan pendidikan dapat memiliki dampak positif jangka panjang terhadap produktivitas dan pertumbuhan. Namun, ini juga membutuhkan alokasi sumber daya yang signifikan dan dapat mempengaruhi alokasi sumber daya ke sektor lain.

Modalitas Kontrol Pemerintah: Hukum dan Peraturan Dalam Agenda Pembangunan Negara Berkembang

Hukum dan peraturan memegang peran penting dalam membentuk perekonomian dan perannya dalam alokasi sumber daya tidak dapat diabaikan. Dalam konteks pembangunan di negara berkembang, hukum dan peraturan dapat digunakan sebagai alat untuk mengarahkan investasi dan sumber daya ke sektor-sektor yang dianggap penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Hukum dan peraturan dapat mempengaruhi alokasi sumber daya melalui berbagai cara. Misalnya, hukum kepemilikan dapat menentukan siapa yang berhak memiliki dan menggunakan sumber daya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi investasi dan produksi di berbagai sektor ekonomi (Acemoglu & Johnson, 2005). Peraturan perdagangan dan investasi dapat mempengaruhi arus investasi dan barang, sementara peraturan lingkungan dan perburuhan dapat mempengaruhi biaya produksi dan dengan demikian alokasi sumber daya. Hukum dan aturan sering digunakan sebagai instrumen penting dalam mengarahkan dan memfasilitasi agenda pembangunan di negara-negara berkembang. Kedua instrumen ini mendefinisikan kerangka perundangan-undangan yang menjadi dasar bagi aktivitas ekonomi, sosial, dan politik dalam sebuah negara. Dengan demikian, mereka memiliki dampak yang signifikan pada alokasi sumber daya, distribusi kekayaan, dan proses pembangunan secara keseluruhan.

Berbagai macam contoh produk hukum seperti Hukum properti mendefinisikan hak dan tanggung jawab pemilik terhadap properti mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi insentif untuk investasi dan penggunaan sumber daya (Besley & Ghatak, 2010). Demikian pula, hukum dan peraturan lingkungan dapat menentukan bagaimana sumber daya alam dapat digunakan dan dengan demikian mempengaruhi alokasi sumber daya antara berbagai sektor dan kegiatan ekonomi. Peraturan



yang mengatur perbankan dan pasar keuangan dapat mempengaruhi alokasi kredit dan investasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pola pertumbuhan dan pembangunan (Levine, 2005). Demikian pula, hukum pajak dan peraturan dapat digunakan untuk mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat, yang dapat memiliki dampak signifikan pada keadilan dan pembangunan sosial. Selain itu, hukum dan aturan yang menjamin hak-hak dasar, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, yang pada gilirannya dapat membantu mendorong pembangunan manusia dan sosial (Sen, 1999).

Membahas peran hukum dan aturan dalam alokasi sumber daya di negara berkembang, kita dapat merujuk pada kasus India dan implementasi Hukum Hak atas Pendidikan (RTE) tahun 2009. India, sebagai negara berkembang dengan populasi terbesar kedua di dunia, menghadapi tantangan besar dalam pendidikan. RTE diadopsi sebagai upaya untuk menangani tantangan ini dan mendistribusikan sumber daya lebih adil dalam sistem pendidikan India. RTE mengatur bahwa setiap anak berusia antara 6 dan 14 tahun memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pendidikan gratis dan wajib penuh waktu. Ini mencakup alokasi sumber daya publik ke sektor pendidikan dan pengembangan infrastruktur pendidikan yang lebih baik. Dalam konteks sistem dinamis, penerapan RTE membentuk pola umpan balik positif di mana peningkatan akses pendidikan dapat mendorong lebih banyak investasi dalam pendidikan dan, pada gilirannya, hasil belajar yang lebih baik (Kingdon et al., 2014).

Implementasi RTE telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam akses dan partisipasi dalam pendidikan dasar. Namun, implementasi hukum ini juga memperlihatkan bagaimana hukum dan aturan dapat memiliki efek tak terduga dan kompleks. Misalnya, ada laporan bahwa meskipun partisipasi telah meningkat, kualitas pendidikan tetap menjadi tantangan besar. Beberapa kritik menunjukkan bahwa fokus RTE pada akses dan infrastruktur daripada hasil belajar telah menyebabkan alokasi sumber daya yang kurang optimal (Muralidharan, 2013). Selain itu, implementasi RTE telah mempengaruhi dinamika antara sektor pendidikan publik dan swasta. Misalnya, undang-undang ini mengharuskan sekolah swasta menerima setidaknya 25% siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, yang telah mempengaruhi alokasi sumber daya antara sekolah publik dan swasta (Kremer et al., 2013). Kasus RTE di India menunjukkan bagaimana hukum dan aturan dapat digunakan sebagai instrumen kontrol dalam alokasi sumber daya di negara berkembang. Meski memiliki dampak positif pada akses pendidikan, implementasi hukum ini juga membuktikan bahwa dampak hukum dan aturan dalam sistem dinamis seringkali kompleks dan tak terduga. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan interaksi dan umpan balik dalam sistem saat merumuskan dan mengimplementasikan hukum dan aturan.

Dalam pendekatan Sistem Dinamis, hukum dan peraturan dapat dipandang sebagai instrumen kontrol yang dapat mempengaruhi variabel dan parameter sistem. Namun, hukum dan peraturan bukanlah instrumen yang bekerja dalam isolasi. Mereka berinteraksi dengan berbagai elemen lain dalam sistem, termasuk perilaku pasar, norma sosial, dan faktor politik. Umpan balik dan dinamika ini dapat membuat efek hukum dan peraturan menjadi lebih kompleks dan tidak dapat diprediksi (Stermann, 2000). Misalnya, peraturan yang ditujukan untuk mendorong investasi di sektor tertentu mungkin memiliki dampak tidak langsung pada sektor lain. Ini bisa berupa efek positif, seperti peningkatan permintaan atas produk atau jasa dari sektor lain, atau efek negatif, seperti pergeseran sumber daya dari sektor lain. Hukum dan aturan dapat dipandang sebagai instrumen kontrol yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai elemen dan umpan balik dalam sistem. Misalnya, perubahan dalam hukum dan aturan dapat mempengaruhi perilaku pasar, norma sosial, dan faktor politik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pola alokasi sumber daya dan proses pembangunan. Namun, efek hukum dan aturan sering kali lebih kompleks dan tidak dapat diprediksi, dengan umpan balik dan interaksi yang dapat menyebabkan dampak yang tidak diharapkan atau kontradiktif. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk menggunakan pendekatan sistem dinamis, yang mempertimbangkan interaksi dan umpan balik dalam sistem, dalam merumuskan dan mengimplementasikan hukum dan aturan.

KESIMPULAN

Setelah melakukan simulasi model alokasi sumber daya untuk sektor ekonomi dan pengawasan dalam tulisan ini, 3 *constant* (konstanta) yaitu : *fractional resource growth* mempunyai pengaruh serta



memiliki hubungan kausal positif dengan *rate resource growth*, *rate resources growth* mempengaruhi dan memiliki hubungan kausal positif pada *level economic resources*. *Level economic resources* mempengaruhi dan memiliki hubungan kausal positif terhadap *rate economic resources allocated to control* yang dipengaruhi dan memiliki hubungan kausal positif dari *constant pressure from control resources adequacy on allocation*. *Rate economic resources allocated to control* mempengaruhi dan memiliki hubungan kausal positif pada *level control resources*. *Level control resources* mempengaruhi dan memiliki hubungan kausal positif terhadap *Rate control resources allocated to economic sector* yang dipengaruhi dan memiliki hubungan kausal positif dari *constant pressure for welfare*. *Rate control resources allocated to economic sector* mempengaruhi dan memiliki hubungan kausal positif pada *level economic resources*, dan begitu seterusnya membentuk sistem aliran yang berkesinambungan dan terus menerus.

Dalam konteks pembangunan di negara-negara berkembang, pemerintah memiliki peran penting dan beragam dalam membentuk dan mengawasi agenda pembangunan. Melalui berbagai modalitas kontrol, pemerintah mampu mempengaruhi alokasi sumber daya, menentukan prioritas pembangunan, dan memastikan bahwa pembangunan berlangsung sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pertama, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan moneter sebagai instrumen kontrol utama dalam mengelola ekonomi dan mempengaruhi alokasi sumber daya. Melalui pengaturan pajak, belanja publik, dan kebijakan kredit, pemerintah dapat merangsang atau meredam aktivitas ekonomi tertentu dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan ke sektor-sektor yang dianggap penting untuk pembangunan. Kedua, pemerintah juga berperan dalam menetapkan hukum dan peraturan yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Melalui pengaturan hukum dan kebijakan, pemerintah dapat memberikan insentif atau hambatan bagi aktivitas ekonomi tertentu, dan dengan demikian mempengaruhi alokasi sumber daya dan arah pembangunan. Ketiga, pemerintah juga berperan penting dalam memantau dan mengevaluasi proses pembangunan. Melalui pengawasan dan evaluasi, pemerintah dapat memantau perkembangan, mengidentifikasi masalah dan peluang, dan merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk menangani masalah tersebut.

Dalam semua modalitas kontrol ini, pendekatan sistem dinamis memainkan peran penting. Dengan memahami dan merespons dinamika dan umpan balik dalam sistem ekonomi dan sosial, pemerintah dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif, dan dengan demikian mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, tantangan yang ada adalah bagaimana pemerintah dapat menggunakan modalitas kontrol ini dengan cara yang transparan, bertanggung jawab, dan partisipatif. Untuk itu, pembangunan dan peningkatan kapasitas institusional, peningkatan tata kelola, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci yang perlu diperhatikan. Jadi, kesimpulannya, modalitas kontrol pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk dan mengawasi agenda pembangunan di negara-negara berkembang. Namun, penerapannya harus dilakukan dengan cara yang memastikan keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D. & Robinson, J. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business: New York.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2006). *Economic origins of dictatorship and democracy*. Cambridge University Press.
- Alesina, A., Ozler, S., Roubini, N., & Swagel, P. (1996). Political instability and economic growth. *Journal of Economic Growth*, 1(2), 189-211.
- Bardhan, P. (2002). Decentralization of Governance and Development. *Journal of Economic Perspectives*, 16(4), 185-205.
- Barro, R. J., & Grilli, V. (1994). *European macroeconomics*. Macmillan Education UK.
- Besley, T., & Ghatak, M. (2010). Property Rights and Economic Development. In D. Rodrik & M. Rosenzweig (Eds.), *Handbook of Development Economics* (Vol. 5, pp. 4525–4595). Elsevier.



- Bose, N., Haque, M. E., & Osborn, D. R. (2007). Public expenditure and economic growth: A disaggregated analysis for developing countries. *The Manchester School*, 75(5), 533-556.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press.
- Easton, D. (1953). *The Political System. An Inquiry into the State of Political Science*. New York: Alfred A. Knopf.
- Frank, A.G. (1966). *The Development of Underdevelopment*. Monthly Review Press.
- Friedman, M. (1962). *Capitalism and Freedom*. University of Chicago Press.
- Forrester, J. W. (1961). *Industrial dynamics*. MIT press.
- Frank, A. G. (1966). *The Development of Underdevelopment*. Monthly Review Press: New York.
- Grindle, M.S. (2004). Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 17(4), 525–548.
- Keynes, J.M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Palgrave Macmillan.
- Kingdon, G. G., Little, A., Aslam, M., Rawal, S., Moe, T., Patrinos, H., ... & Govinda, R. (2014). A rigorous review of the political economy of education systems in developing countries. Education rigorous literature review. Department for International Development.
- Kremer, M., Brannen, C., & Glennerster, R. (2013). The challenge of education and learning in the developing world. *Science*, 340(6130), 297-300.
- Levine, R. (2005). Finance and Growth: Theory and Evidence. In P. Aghion & S. Durlauf (Eds.), *Handbook of Economic Growth* (Vol. 1, pp. 865–934). Elsevier.
- Mankiw, N. G. (2000). The savers-spenders theory of fiscal policy. *American Economic Review*, 90(2), 120-125.
- Muralidharan, K. (2013). Priorities for primary education policy in India's 12th Five-year Plan. *India Policy Forum*, 9(1), 1-46.
- Mainwaring, S., & Torcal, M. (2006). Party system institutionalization and party system theory after the third wave of democratization. In R. S. Katz & W. J. Crotty (Eds.), *Handbook of party politics* (pp. 204-227). Sage.
- Naughton, B. (2007). *The Chinese Economy: Transitions and Growth*. MIT Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Alfred A. Knopf.
- Sterman, J. D. (2000). *Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world*. Irwin/McGraw-Hill.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*.
- Rostow, W.W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge University Press.
- United Nations (2020). *World Economic Situation and Prospects 2020*. United Nations: New York.



United Nations Development Programme (2020). Human Development Report 2020. UNDP: New York.

United Nations (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations: New York.

Wallerstein, I. (1974). The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. Academic Press.

World Bank. (2019). World Development Indicators. World Bank Publications.

Woo-Cumings, M. (1999). The Developmental State. Cornell University Press.

Wade, R. (1990). Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. Princeton University Press.

World Commission on Environment and Development (WCED) (1987). Our Common Future. Oxford University Press: Oxford.

World Bank. (2019). World Development Indicators. World Bank Publications.

Stavins, R. N. (2003). Experience with market-based environmental policy instruments. Handbook of environmental economics, 1, 355-435.

Przeworski, A., Alvarez, M., Cheibub, J. A., & Limongi, F. (2000). Democracy and development: Political institutions and material well-being in the world, 1950-1990. Cambridge University Press.

